

BAB I

PENDAHULUAN

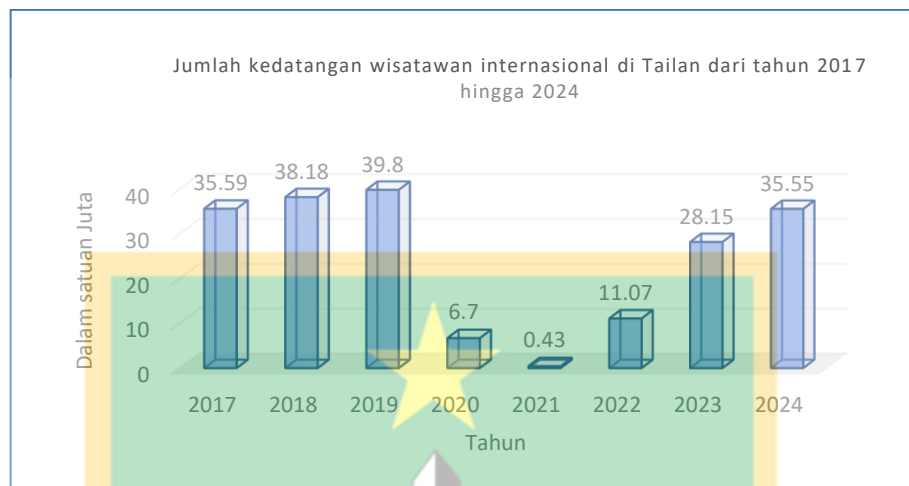
1.1 Latar Belakang

Pariwisata global telah menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat menentukan di abad ke-21. Seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, kemudahan penyebaran informasi lewat internet dan media sosial, serta liberalisasi visa dan investasi infrastruktur di banyak negara, perjalanan internasional menjadi semakin murah dan mudah diakses. Di Asia Tenggara, fenomena ini terasa sangat nyata. Negara-negara di Kawasan TAILAN, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, telah mengembangkan pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi (ASEAN, n.d.). Pembukaan rute penerbangan, promosi destinasi secara global, serta fokus pada wisata budaya, alam, dan kuliner telah menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Pertumbuhan ini jelas membawa manfaat seperti devisa yang meningkat, lapangan kerja di sektor akomodasi, transportasi, kuliner, layanan perjalanan, dan daya tarik investasi di wilayah-wilayah wisata.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana pariwisata saat ini bukan lagi sekadar kegiatan rekreasi atau hiburan, melainkan sudah berkembang menjadi sebuah industri besar yang berpengaruh pada cara hidup masyarakat, hubungan antarnegara, dan perkembangan ekonomi di berbagai wilayah. Ketika orang bepergian dari satu negara ke negara lain, terjadi pertukaran budaya, peningkatan aktivitas ekonomi, dan munculnya berbagai layanan baru yang mengikuti kebutuhan wisatawan. Di Asia Tenggara, perkembangan pariwisata juga membuktikan bahwa banyak negara mampu memanfaatkan kekayaan budaya, keindahan alam, dan tradisi lokal sebagai aset penting untuk menarik wisatawan internasional.

Namun, pertumbuhan pariwisata tidak hanya membawa keuntungan. Ada pula dampak sosial yang rumit, seperti tekanan terhadap budaya lokal yang mulai berubah karena tuntutan industri pariwisata, tradisi yang dikomersialkan untuk menarik perhatian wisatawan, hingga munculnya masalah-masalah serius seperti eksploitasi, ketimpangan sosial, dan penyalahgunaan ruang publik. Dengan kata

lain, pariwisata bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga ruang di mana identitas budaya, nilai-nilai sosial, dan aturan masyarakat diuji dan berubah mengikuti perkembangan zaman.



Tabel Data 1.1

Data Wisatawan Internasional Tailan 2017-2024

Tailan adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana pariwisata bisa menjadi penggerak ekonomi yang kuat. Sebelum pandemi COVID-19, sektor pariwisata menyumbang sekitar 11,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Tailan pada 2019 (Biswas, 2023). Meskipun pandemi sempat sangat menghantam kunjungan internasional ke Tailan, mulai 2022 sektor pariwisata menunjukkan pemulihan signifikan. Dalam data World Travel & Tourism Council, industri pariwisata “Travel and Tourism” menghasilkan pendapatan langsung yang mencapai lebih dari satu triliun Thai baht pada tahun tersebut (Council, 2023). Data dari STATISTA yang saya tunjukkan pada table 1.1 juga menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan internasional walau belum kembali ke level puncak tahun 2019 (sekitar 39,8 juta pengunjung), sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tingkat terendah di masa pandemi (Walderich, 2025).

Kenaikan jumlah wisatawan yang kembali memasuki Tailan setelah pandemi menunjukkan betapa kuatnya daya tarik negara tersebut dan bagaimana sektor pariwisata telah terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Pemulihan cepat ini juga menggambarkan ketergantungan ekonomi Tailan terhadap kunjungan wisatawan asing. Keberhasilan pariwisata Tailan bukan hanya berasal dari promosi

budaya dan destinasi alamnya, tetapi juga dari keefektifan strategi pemasaran global dan keterlibatan swasta dalam menyediakan fasilitas wisata. Namun, perkembangan pesat ini juga menyebabkan berbagai tekanan, terutama terhadap kapasitas negara dalam mengatur aktivitas wisata yang semakin meluas, termasuk aktivitas-aktivitas yang sulit dikontrol seperti perdagangan seksual dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akibat pariwisata menyimpan dimensi kompleks yang sering kali luput dari perhatian, khususnya terkait kerentanan kelompok rentan seperti perempuan dan anak.



Gambar 1.1

Sex Tourism Tailan. Sumber: Liputan6.com

Pariwisata di Tailan merupakan sektor yang sangat penting dan terus berkembang, dengan Bangkok sebagai pusat utama kegiatan wisata. Bangkok sebagai ibu kota menawarkan banyak daya tarik yang mudah dinikmati oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kota ini terkenal dengan kuil-kuil bersejarah, istana kerajaan, pasar tradisional, serta budaya lokal yang masih terjaga. Selain itu, Bangkok juga dikenal sebagai kota modern dengan pusat perbelanjaan besar, hotel, restoran, dan hiburan malam yang lengkap. Akses transportasi yang mudah, fasilitas wisata yang memadai, serta promosi pariwisata yang aktif dari pemerintah membuat Bangkok menjadi tujuan wisata favorit di Asia Tenggara. Perpaduan antara budaya tradisional dan kehidupan kota modern menjadikan Bangkok memiliki daya tarik yang kuat bagi berbagai kalangan wisatawan.

Di balik angka gemilang pertumbuhan pariwisata ini, muncul sebuah realitas yang sering tersembunyi, fenomena apa yang disebut “Wisata seks”. Wisata seks atau *Sex Tourism* adalah bentuk kegiatan pariwisata di mana seseorang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, biasanya ke negara atau wilayah tertentu dengan tujuan utama untuk terlibat dalam aktivitas seksual berbayar atau hubungan intim dengan penduduk lokal maupun pekerja seks komersial.

Bangkok dikenal dengan julukan “*City of Angels*” atau dalam bahasa Thai “*Krung Thep*”, yang berarti Kota Para Malaikat. Julukan ini menggambarkan Bangkok sebagai kota yang megah, religius, dan kaya akan budaya serta spiritualitas. Namun, di balik citra religius dan kemegahan itu, Bangkok juga dikenal dengan sisi lain yang kontras, sebagai “Kota Dosa” (*sin city*) di Asia karena maraknya kehidupan malam dan industri hiburan dewasa dan “*red-light districts*” seperti Patpong, Nana Plaza, dan Soi Cowboy yang sering dijadikan simbol wisata seks di Tailan (Weitzer, *Sex Tourism in Thailand Inside Asia's Premier Erotic Playground*, 2023). Area-area ini menawarkan hiburan malam tinggi, bar, klub strip, dan kegiatan yang kerap terkait dengan prostitusi komersial dan layanan seksual lainnya. Keterkenalan internasional Bangkok dalam hal ini menjadikannya studi kasus yang penting untuk memahami bagaimana pariwisata, regulasi, budaya, dan keterkaitan pihak internasional saling berinteraksi.

Dualitas identitas Bangkok sebagai kota religius sekaligus pusat hiburan dewasa menciptakan ironi sosial yang menarik untuk diteliti. Di satu sisi, Bangkok dikenal sebagai pusat spiritualitas dan budaya Tailan yang kaya, tetapi di sisi lain kota ini juga terkenal karena kehidupannya yang sangat terbuka dan dipromosikan hingga ke mancanegara. Kawasan seperti Patpong atau Nana Plaza menjadi contoh bagaimana distrik merah berkembang bukan hanya sebagai tempat hiburan bagi wisatawan, tetapi juga sebagai lokasi penelitian bagi akademisi, jurnalis, dan aktivis yang ingin memahami bagaimana industri seksual bekerja di balik layar.

Ketertarikan wisatawan asing terhadap kawasan-kawasan ini menunjukkan bahwa wisata seks telah memberi kontribusi ekonomi bagi masyarakat local, misalnya dengan terciptanya lapangan kerja di bar, klub malam, strip club, hingga

layanan pendamping (escort). Namun, di balik itu semua, keberadaan tempat-tempat tersebut juga membuka ruang bagi berbagai bentuk eksploitasi, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang berada dalam posisi rentan dan sering tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lebih aman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kehidupan malam Bangkok memberi keuntungan ekonomi, ia juga menyimpan berbagai masalah sosial yang sulit diabaikan.

Eksploitasi seksual dalam konteks *Sex Tourism* di Tailan menunjukkan sisi gelap dari industri pariwisata yang selama ini dikenal luas oleh wisatawan dunia. Di balik ramainya kunjungan wisata dan hiburan malam, terdapat pemanfaatan perempuan dan anak untuk memenuhi permintaan wisata seksual. Sebagian dari mereka terlibat secara sukarela, tetapi sebagian lagi dipaksa oleh keadaan, tekanan ekonomi, penipuan, atau ancaman, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti praktik tersebut.

Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam praktik *Sex Tourism*. Eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi secara tersembunyi, baik melalui tempat hiburan malam, panti pijat, maupun jaringan daring yang melibatkan wisatawan asing. Situasi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan anak karena menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius.

Menurut Kementerian Pengendalian Penyakit Tailan, pada tahun 2017 terdapat sekitar 144.000 pekerja seks di Tailan, dan sebanyak 129.000 di antaranya adalah perempuan. Sekitar 27% dari pekerja seks perempuan tersebut diperkirakan berusia di bawah 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa *Sex Tourism* tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga menjadi ruang eksploitasi serius terhadap anak-anak, sehingga mempertegas bahwa praktik ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak. (HE Yingxin, 2024)

Dalam perspektif Hubungan Internasional, eksploitasi seksual dipahami sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan banyak negara dan berbagai aktor. Eksploitasi seksual bukan hanya dianggap sebagai kejahatan biasa, tetapi sebagai masalah global yang muncul karena adanya hubungan sosial, politik, dan ekonomi antara negara satu dengan yang lain.

Eksplorasi seksual, seperti prostitusi paksa, perdagangan manusia, hingga pornografi anak, sering dilakukan oleh jaringan yang bekerja secara transnasional. Artinya, pelakunya bisa berasal dari negara lain, korbannya dari negara lain, dan tempat kejadiannya pun bisa berada di negara yang berbeda. Fenomena ini semakin mudah terjadi karena beberapa faktor, seperti lemahnya hukum, tingginya permintaan dari wisatawan, serta kondisi ekonomi yang membuat perempuan dan anak lebih rentan dimanfaatkan.

Dalam konteks pariwisata internasional, termasuk di kota seperti Bangkok, eksploitasi seksual menjadi isu yang rumit karena melibatkan banyak pihak mulai dari turis asing, pelaku lokal, agen perekrutan, hingga bagian dari industri pariwisata itu sendiri. Situasi ini membuat eksploitasi seksual tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam keamanan manusia, stabilitas negara, dan citra Tailan di mata dunia.

Karena sifatnya yang lintas batas, isu eksploitasi seksual dalam Hubungan Internasional dianggap sebagai bagian dari keamanan non-tradisional, yakni ancaman yang tidak selalu berupa perang atau konflik, tetapi tetap membahayakan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan kerja sama antarnegara, dukungan organisasi internasional seperti PBB, dan komitmen setiap negara untuk menjalankan berbagai aturan internasional tentang perlindungan perempuan dan anak.

Eksplorasi seksual di Tailan, khususnya di Bangkok, tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan struktural yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi dan kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat Tailan, terutama di daerah pedesaan. Banyak perempuan dan anak muda dari keluarga kurang mampu akhirnya pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan, namun karena peluang kerja yang terbatas, sebagian dari mereka masuk atau dipaksa masuk ke industri seks. Situasi ini semakin diperburuk oleh tingginya permintaan dari wisatawan asing yang datang ke Bangkok dengan tujuan menikmati hiburan malam dan layanan seksual. Permintaan yang besar ini mendorong tumbuhnya

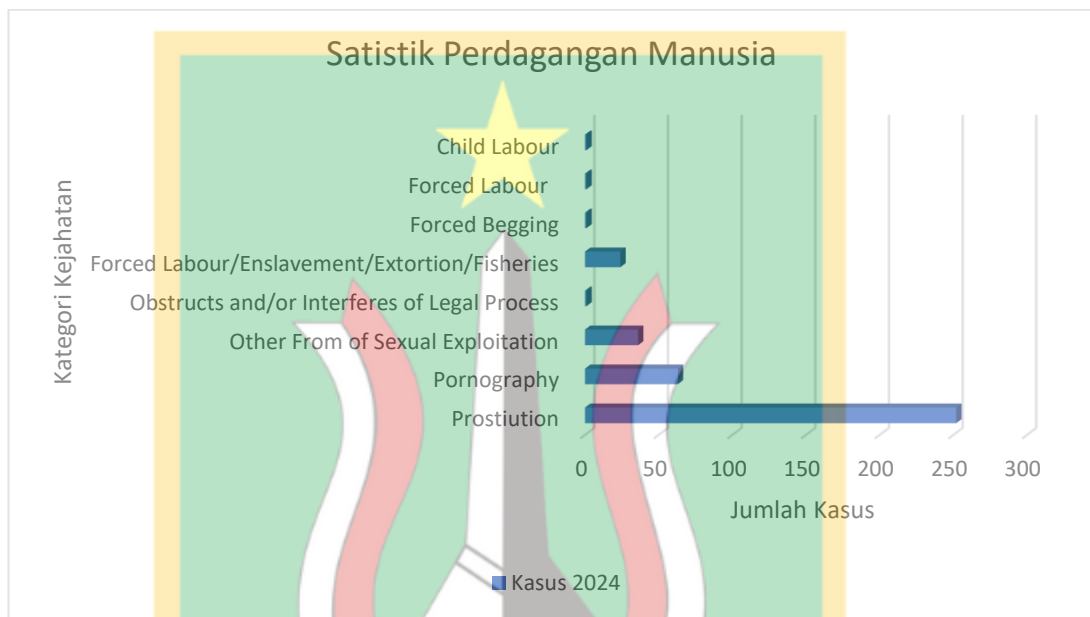
industri *Sex Tourism*, sehingga praktik-praktik ilegal seperti prostitusi paksa dan perdagangan perempuan dan anak semakin marak.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang membuat eksploitasi seksual sulit diberantas. Meskipun Tailan memiliki regulasi yang cukup jelas terkait prostitusi dan perdagangan orang, praktik korupsi di kalangan aparat, kurangnya operasi pengawasan, serta adanya toleransi terhadap industri hiburan malam membuat kegiatan ilegal tersebut tetap berlangsung secara terbuka. Industri pariwisata itu sendiri turut memperkuat kondisi ini. Kawasan hiburan seperti Patpong, Nana Plaza, dan Soi Cowboy berkembang menjadi destinasi wisata “dewasa” yang secara tidak langsung diperkuat oleh keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata. Bisnis hiburan malam yang tampak legal sering kali menjadi kedok untuk praktik eksploitasi seksual yang melibatkan perempuan dan anak.

Faktor budaya dan norma sosial juga memainkan peran penting. Dalam masyarakat Tailan, unsur patriarki masih cukup kuat, sehingga perempuan sering dianggap sebagai objek seksual atau bagian dari layanan hiburan. Normalisasi industri seks di beberapa wilayah Bangkok membuat masyarakat cenderung mengabaikan atau menyepelekan adanya eksploitasi seksual. Selain itu, keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir yang mengendalikan perdagangan perempuan dan anak membuat praktik ini semakin sulit dihentikan. Jaringan kriminal ini biasanya bekerja lintas wilayah, bahkan antarnegara, dengan sistem perekrutan yang rapi dan memanfaatkan kerentanan korban. Tidak hanya warga lokal, pekerja migran dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja juga menjadi target eksploitasi karena status mereka yang tidak berdokumen, sehingga sangat rentan terhadap pemaksaan dan intimidasi. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menjadikan eksploitasi seksual di Tailan, khususnya dalam konteks *Sex Tourism*, sebagai masalah yang kompleks, terstruktur, dan sulit diatasi tanpa upaya komprehensif dari pemerintah maupun komunitas internasional.

Perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai wisata seks. Laporan-laporan dari organisasi internasional seperti UNICEF, ECPAT,

INTERPOL, serta laporan pemerintah Tailan menyebutkan adanya eskalasi dalam eksploitasi seksual secara offline maupun daring. Contohnya, dalam laporan yang dirilis oleh UNICEF dan ECPAT (2022), disampaikan bahwa sekitar 9% anak-anak usia 12-17 tahun di Tailan, setara dengan kira-kira 400.000 anak, menjadi korban eksploitasi seksual dan penyalahgunaan online pada tahun 2021. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa masalah ini seringkali “tersembunyi” hanya 1-3% korban yang melaporkan pengalaman mereka ke polisi (UNICEF, 2022).



Tabel 1.1

(Data Statistik Perdagangan Manusia di Tailan 2024)

Dalam laporan *Royal Governments's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2024* juga menyebutkan bahwa Bangkok menjadi kota tertinggi dalam kasus *Human Trafficking* dan 92,87% dari semua kasus yang ditangani adalah prostitusi (Government, 2024).

Data-data tersebut menggambarkan tingginya tingkat kerentanan anak-anak dan perempuan terhadap eksploitasi seksual di Tailan, khususnya di kota besar seperti Bangkok. Banyak korban berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang sulit, di mana kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tekanan keluarga membuat mereka mudah dimanipulasi atau direkrut oleh pelaku eksploitasi. Di era digital, eksploitasi seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dilakukan melalui

platform daring yang sulit dipantau. Internet menyediakan ruang yang mempermudah pelaku untuk melakukan *grooming*, menjebak korban, serta mendistribusikan konten eksploitasi seksual anak. Rendahnya tingkat pelaporan mencerminkan adanya rasa takut, stigma sosial, dan ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum. Kondisi ini memperburuk situasi karena semakin sedikit kasus yang terungkap, semakin sulit bagi negara untuk menindak jaringan eksploitasi yang semakin terorganisir. *Underreporting* juga menyebabkan statistik resmi sering kali terlihat lebih rendah dibandingkan situasi sebenarnya.

Isu eksploitasi seksual dalam pariwisata juga menjadi perhatian berbagai organisasi internasional seperti UNICEF, IOM, UNODC, dan ECPAT International. Organisasi-organisasi tersebut terlibat dalam berbagai program pencegahan eksploitasi seksual, perlindungan korban, serta advokasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan di Tailand. Keterlibatan aktor internasional ini menunjukkan bahwa permasalahan *Sex Tourism* di Bangkok tidak hanya merupakan isu domestik, tetapi juga menjadi perhatian global yang memerlukan kerja sama lintas negara.

Bentuk-bentuk eksploitasi yang dijumpai sangat bervariasi. Ada prostitusi paksa, pemaksaan dalam layanan seks komersial, perdagangan manusia (*trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seksual, penggunaan teknologi untuk melakukan eksploitasi daring seperti pengiriman gambar atau video seksual, *live streaming*, dan *cybersex*, hingga anak-anak di bawah umur yang dipaksa menjadi bagian dari industri seksual, baik dalam bentuk tatap muka maupun virtual. Korban biasanya datang dari kalangan lokal hingga migran, namun kebanyakan korban berasal dari daerah pedesaan yang ekonomi keluarganya lemah, lalu terdorong ke perkotaan oleh harapan penghidupan yang lebih baik.

Di Bangkok, wisata seks sangat beragam dan memiliki indikasi eksploitasi seksual yang serius, terutama terhadap perempuan muda dan remaja.

No	Wisata Seks	Penjelasan
1.	Wisata seks berbasis bar dan klub	Salah satu yang paling terkenal adalah wisata seks berbasis bar dan klub malam, seperti di kawasan Patpong, Nana Plaza,

		dan Soi Cowboy, di mana turis asing datang untuk menikmati tarian erotis atau layanan di go-go bar dan beer bar.
2.	<i>Escort dan massage parlor tourism</i>	Selain itu, <i>escort dan massage parlor tourism</i> juga banyak ditemukan di Bangkok. Turis memesan layanan pijat atau escort melalui hotel, spa, atau platform daring yang menawarkan “ <i>happy ending</i> ” atau layanan seksual terselubung.
3.	<i>Sex show tourism</i>	Bentuk lain adalah <i>sex show tourism</i> , misalnya pertunjukan erotis seperti “ <i>Ping Pong Show</i> ” yang banyak terdapat di Patpong dan beberapa klub di Nana Plaza.
4.	Paket wisata seks	Selain bar, klub, dan massage parlor, di Bangkok juga terdapat paket wisata seks (<i>Sex Tourism package</i>) yang ditawarkan oleh agen tidak resmi. Paket ini biasanya mencakup hotel, transportasi, dan akses ke hiburan malam, termasuk bar privat atau klub yang menyediakan pekerja seks.

Secara hukum dan institusi, Tailan sudah membuat sejumlah regulasi dan lembaga untuk menghadapi eksploitasi seksual. Ada undang-undang seperti *Child Protection Act* (2003) dan *Anti-Trafficking in Persons Act* (2008), serta institusi pemerintah seperti *Ministry of Social Development and Human Security* (MSDHS) (Candra, 2018). Perbedaan utama antara kedua undang-undang tersebut terletak pada fokus dan cakupan perlindungannya. *Child Protection Act* (2003) secara spesifik menitikberatkan pada perlindungan anak dan pencegahan segala bentuk eksploitasi terhadap anak, dengan pendekatan kesejahteraan dan rehabilitasi.

Sementara itu, Anti-Trafficking in Persons Act (2008) memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur kejahatan perdagangan manusia secara menyeluruh, baik terhadap anak maupun orang dewasa, serta berfokus kuat pada penindakan pidana terhadap pelaku jaringan trafficking.

Pemerintah Tailan juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, IOM, ECPAT International dalam kampanye, pencegahan, pelaporan korban, dan program rehabilitasi. Namun, laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa implementasinya belum sempurna, ada masalah *underreporting* (banyak korban tidak melapor atau tidak diketahui), pengawasan yang lemah, korupsi konflik kepentingan dengan kepentingan pariwisata, serta kendala penegakan hukum (tidak semua aparat memiliki kapasitas, ada daerah terpencil yang sulit dijangkau, dan kadang hukum berjalan lambat atau tidak konsisten).

Kerangka hukum yang dimiliki Tailan sebenarnya sudah cukup kuat untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual. Child Protection Act dibuat untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Sementara itu, Anti-Trafficking in Persons Act menjadi dasar hukum bagi aparat untuk menindak para pelaku perdagangan manusia. Namun, meskipun aturan hukum ini terlihat baik di atas kertas, kenyataannya pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Ada banyak faktor yang membuat penegakan hukum sulit dilakukan dengan maksimal. Salah satu masalah terbesar adalah tingginya tingkat korupsi, yang menyebabkan sebagian aparat justru melindungi bisnis ilegal alih-alih menindak pelanggaran. Selain itu, sering terjadi konflik kepentingan antara pelaku industri pariwisata dan pemerintah lokal. Banyak pihak merasa bahwa menindak praktik prostitusi komersial dapat merugikan pemasukan daerah, sehingga penegakan hukum sering diabaikan atau dilakukan setengah hati.

Masalah lainnya adalah kurangnya tenaga profesional dan fasilitas pendukung untuk menangani kasus eksploitasi seksual, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Bahkan di Bangkok yang merupakan Kota terbesar sekaligus

pusat administrasi, penanganan kasus masih terkendala oleh jumlah penyidik yang tidak memadai dan kurangnya keahlian dalam menangani kasus-kasus modern seperti eksploitasi seksual daring. Akibatnya, banyak kasus berhenti tanpa tindakan lanjut, dan para korban tidak mendapatkan perlindungan, pendampingan, maupun keadilan yang mereka butuhkan.

1.2 Rumusan masalah

Fenomena industri wisata seks di Bangkok menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata yang seharusnya memberikan dampak ekonomi positif justru membuka ruang bagi praktik eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Permasalahan ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara sektor pariwisata, budaya, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana pemerintah Tailan dan lembaga internasional mampu menjamin perlindungan hak asasi perempuan dan anak dari praktik eksploitasi yang terjadi secara sistematis. Penelitian ini juga berupaya memahami tantangan-tantangan struktural, budaya, dan hukum yang menghambat perlindungan Hak Asasi Manusia pada Perempuan dan Anak di Bangkok, Tailan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis hubungan antara fenomena wisata seks di Bangkok serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan anak. Penelitian ini menyoroti bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi, budaya patriarki, serta lemahnya implementasi hukum di Tailan menciptakan kerentanan bagi kelompok perempuan dan anak untuk menjadi korban eksploitasi seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana upaya pemerintah Tailan dalam perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak terkait *Sex Tourism* dalam studi kasus eksploitasi seksual di Bangkok?**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi upaya-upaya perlindungan yang dilakukan dalam konteks eksploitasi seksual di Bangkok, dengan fokus pada kerentanan perempuan dan anak.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab dan kondisi struktural (sosial, ekonomi, budaya, dan politik) yang memungkinkan terjadinya praktik eksploitasi seksual di Bangkok.
3. Mengkaji sejauh mana efektivitas kebijakan nasional Tailan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban eksploitasi seksual.
4. Menganalisis tantangan utama dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban wisata seks dan perdagangan manusia.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan untuk memfokuskan kajian agar lebih terarah dan mendalam. Adapun batasannya adalah:

1. Fokus Geografis: Penelitian hanya membahas wisata seks di Bangkok, tidak mencakup wilayah lain di Tailan seperti Pattaya atau Phuket.
2. Subjek Penelitian: Penelitian menitikberatkan pada Upaya perlindungan perempuan dan anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam konteks wisata seks di Bangkok.
3. Aspek Analisis: Penelitian menganalisis tantangan perlindungan hak asasi manusia bagi korban, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun kebijakan, tanpa membahas aspek ekonomi wisata seks di Bangkok.
4. Periode Waktu: Penelitian difokuskan pada data dan fenomena terkini (sekitar 2020–2024) untuk mencerminkan kondisi terbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I, Penulis menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian ini, dengan fokus pada praktik wisata seks di Bangkok dan dampaknya

terhadap eksploitasi seksual perempuan dan anak. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II, Penulis menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik eksploitasi seksual, wisata seks, dan perlindungan hak asasi perempuan dan anak, guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Bab ini juga membahas landasan teori yang digunakan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab III, Penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis data. Bab ini juga menguraikan objek penelitian, serta aspek, dimensi, dan parameter yang digunakan untuk menganalisis eksploitasi seksual perempuan dan anak dalam konteks wisata seks di Bangkok.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada Bab IV, Penulis menguraikan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai praktik wisata seks di Bangkok serta faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak. Bab ini juga membahas inkonsistensi regulasi dan ruang abu-abu hukum, serta upaya pemerintah Tailan dan kerja sama internasional dalam melindungi hak asasi perempuan dan anak.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V, Penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara menyeluruh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, pemangku kepentingan terkait, serta peneliti selanjutnya, guna memperkuat upaya perlindungan hak asasi perempuan dan anak dalam konteks wisata seks di Tailan.